

IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK OLEH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Noor Mazidah¹, Ramona Handayani², Siti Raudah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : nmazidah813@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan berkaitan dengan Implementasi Program Sekolah Penggerak oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur meliputi Koordinasi yang kurang baik, Petugas atau pendamping khusus dalam pembinaan belum memenuhi syarat atau kualifikasi kompetensi, Kurangnya pemahaman pihak sekolah terhadap persiapan Guru/Petugas/Tenaga Administrasi dalam melaksanakan program sekolah penggerak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Sekolah Penggerak oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara *Snowball Sampling*, Teknik analisis data meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Program Sekolah Penggerak oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur belum optimal, disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, komunikasi yang meliputi transmisi informasi, konsistensi, dan kejelasan informasi dinilai kurang baik, sehingga menyebabkan pemahaman program di tingkat sekolah terbatas. Kedua, sumber daya meliputi kekurangan kompetensi pendamping, minimnya ketersediaan informasi, dan fasilitas yang belum memadai. Ketiga, sikap pelaksana menunjukkan tanggung jawab dan komitmen yang baik dari kepala sekolah dan guru. Keempat, struktur birokrasi, khususnya fragmentasi tugas, terganggu oleh keterbatasan SDM yang kompeten. Faktor yang mempengaruhi implementasi Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Barito Timur mencakup faktor penghambat seperti kurangnya penyebaran informasi yang merata, keterbatasan SDM dengan hanya 6 dari 13 sekolah yang memiliki fasilitator, keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pendampingan, serta koordinasi yang kurang optimal antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan fasilitator. Faktor pendorong meliputi komitmen pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan melalui kebijakan, alokasi anggaran, dukungan teknis, serta tanggung jawab tinggi dalam pelaksanaan program untuk memajukan pendidikan di wilayah tersebut.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sekolah Penggerak

ABSTRACT

Problems related to the Implementation of the School Mover Program by the East Barito Regency Education Office include poor coordination, officers or special assistants in coaching do not meet the competency requirements or qualifications, lack of understanding by the school regarding the preparation of teachers/officers/administrative staff in implementing the school mover program. The purpose of this study was to determine the Implementation of the School Mover Program by the East Barito Regency Education Office and the factors that influence it. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Determination of informants by Snowball Sampling, Data analysis techniques include data condensation, data processing and drawing conclusions/verification. The results of the study indicate that the implementation of the School Mover Program by the Barito Timur Regency Education Office has not been optimal, due to several factors. First, communication including information transmission, consistency, and clarity of information is considered poor, resulting in limited understanding of the program at the school level. Second, resources include lack of assistant competence, minimal availability of information, and inadequate facilities. Third, the attitude of the implementer shows good responsibility and commitment from the principal and teachers. Fourth, the bureaucratic structure, especially the fragmentation of tasks, is disrupted by the limited competent human resources. Factors influencing the implementation of the School Mover Program in Barito Timur Regency include inhibiting factors such as lack of even distribution of information, limited human resources with only 6 out of 10 schools having facilitators, limited budget for training and mentoring, and less than optimal coordination between the Education Office, schools, and facilitators. Driving factors include the commitment of the local government and the Education Office through policies, budget allocation, technical support, and high responsibility in implementing programs to advance education in the region.

Keywords: Policy Implementation, School Mover

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal dasar yang harus dimiliki individu dalam proses mengembangkan diri untuk menjalankan kehidupan. Sebab untuk menghadapi persaingan di masa yang akan datang, sumber daya manusia yang berkualitaslah yang dapat dijadikan sebagai modal sebuah bangsa. Kemajuan maupun kemunduran dari suatu bangsa bergantung pada para generasi penerus bangsa yakni kaum muda. Maka dari itu, sudah sepantasnya Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan anak dan dapat memberikan perlindungan kepada mereka sehingga mampu bertumbuh dan berkembang dengan aman dan nyaman untuk kemudian menjadi manusia yang berakhlak dan berkualitas. Pengembangan diri juga dalam bidang Pendidikan harus diimbangi dengan pengembangan karakter.

Di dunia pendidikan pasti juga ada kebijakan yang digunakan sebagai cara dan metode agar Pendidikan dapat berkembang. Prabawati, dkk menyebutkan bahwasannya kebijakan publik dibuat dalam kerangka untuk menyelesaikan permasalahan dan mewujudkan tujuan ataupun sasaran tertentu yang diharapkan. Hal tersebut berarti terdapat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mewujudkan tujuan dunia pendidikan. Rivani & Megawati menyebutkan bahwa dalam memutuskan kebijakan dibutuhkan suatu komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut untuk memecahkan permasalahan serta target yang diharapkan dapat tercapai. Oleh karena itu demi tercapainya tujuan bangsa dalam mencerdaskan anak bangsa dan menjadikan anak-anak menjadi manusia yang berkualitas, berakhlak mulia. Hal ini mendorong Menteri Pendidikan untuk membuat Program Sekolah Penggerak.

Program sekolah penggerak ialah program yang telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak berupaya mendorong satuan Pendidikan melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa (Mendikbudristek, 2021).

Program ini berfokus pada kompetensi literasi dan numerasi (holistic) serta karakter yang dimulai dari SDM yang unggul (Kepala Sekolah dan guru) Intervensi dijalankan secara holistik, baik dari sumberdaya manusia sekolah, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah, dan pendampingan asimetris. Mempunyai ruang lingkup yang mencakup keseluruhan kondisi sekolah baik unggulan, negeri maupun swasta. Pendampingan dijalankan selama 3 tahun ajaran, setelah itu sekolah meneruskan upaya tersebut secara mandiri.

Berdasarkan data dari laman Kemendikbud untuk saat ini peserta sekolah penggerak yang ada di Indonesia berjumlah 18.872 sekolah. Sekolah penggerak ini dilaksanakan oleh berbagai jenjang baik dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK baik dari sekolah Negeri ataupun sekolah Swasta. Dengan angkatan pertama berjumlah 4.997 sekolah dan angkatan ke-2 adalah 13.875.

Program ini dilakukan dalam ekosistem yang terintegrasi sampai seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Saat ini tercatat sudah ada 2.972 dan 1.322 sekolah penggerak, berturut-turut di tingkat SMP dan SMA. Ditargetkan pada tahun ajaran 2023/2024 Program Sekolah Penggerak sudah dilaksanakan di 514 kabupaten/kota dan 20.000 satuan pendidikan.

Berdasarkan Kepmendikbud Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, diketahui Pelaksanaan Kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Satuan Pendidikan Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan Program Sekolah Penggerak yang meliputi:

1. sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga satuan pendidikan;

2. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
3. penyiapan guru/pendidik PAUD, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
4. melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
5. melaksanakan pelatihan Program Sekolah Penggerak;
6. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah;
7. pembelajaran dengan paradigma baru;

Diketahui Data Sekolah Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Barito Timur untuk tingkat Sekolah Dasar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Sekolah (NPSN)	Alamat
1.	SD Negeri Jaar	Jaar RT.01
2.	SD Negeri 1 Jaweten	Jl. Jaya Tenggara
3.	SD Negeri 1 Magantis	Desa Magantis
4.	SD Negeri 1 Tamiang Layang	Jl. Nansarunai
5.	SD Negeri 2 Jaar	Jl. Putri Mayang
6.	SD Negeri 2 Jaweten	Jl. Pertamina RT.04
7.	SD Negeri 2 Magantis	Jl. Padat Karya RT.06
8.	SD Negeri 2 Tamiang Layang	Jl. A. Yani No.57
9.	SD Negeri 3 Jaar	Desa Dusun Gumpa
10.	SD Negeri 3 Tamiang Layang	Jl. A. Yani No.58 RT.02
11.	SD Negeri Dorong	Dorong
12.	SD Negeri Bagok	Desa Bagok
13.	SD Negeri Bamban	Desa Bamban

Sumber: Balai Guru Penggerak Prov Kalteng, 2024

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa yang menjadi permasalahan berkaitan dengan Implementasi Program Sekolah Penggerak oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur di antaranya:

1. Koordinasi yang perlu ditingkatkan antara Dinas Pendidikan dengan Satuan pendidikan terkait pendampingan pelaksanaan program sekolah penggerak khususnya dalam hal pembinaan teknis dan penjelasan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan program seperti sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga satuan pendidikan, penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak yang saat ini belum sepenuhnya terlaksana. (*Sumber: Observasi Penulis, Agustus 2024*)
2. Petugas atau pendamping khusus dalam pembinaan belum memenuhi syarat atau kualifikasi kompetensi untuk melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan seperti pemanfaatan teknologi komputer untuk penunjang pendidikan ataupun inovasi untuk metode pembelajaran selain itu kurangnya penyiapan guru/pendidik PAUD, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak. (*Sumber: Observasi Penulis, Agustus 2024*)
3. Kurangnya pemahaman pihak sekolah terhadap penyiapan Guru/Petugas/Tenaga Administrasi dalam melaksanakan program sekolah penggerak, khususnya pemanfaatan teknologi dalam platform pembelajaran. (*Sumber: Observasi Penulis, Agustus 2024*)

Fenomena masalah tersebut mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti masalah yang berkaitan dengan Program Sekolah Penggerak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis

mengupayakan suatu kajian ilmiah dalam judul penelitian “**Implementasi Program Sekolah Penggerak oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur**”.

METODE

Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur yang beralamat pada Jl. Nansarunai - Tamiang Layang No.60, Kecamatan. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, 73671 Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut Sugiyono (dalam Harbani Pasolong, 2013:161), penelitian kualitatif adalah strategi eksplorasi yang digunakan untuk memahami situasi secara alami tanpa eksperimen, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi (kombinasi), analisis bersifat induktif, dan hasilnya menitikberatkan pada makna subjektif dibandingkan dengan generalisasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*, dengan total 12 informan. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Sekolah Penggerak oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur

1. Komunikasi

a. Transmisi

Transmisi yang efektif dalam komunikasi merupakan faktor krusial dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Program ini memerlukan koordinasi yang erat dan pemahaman yang menyeluruh di antara semua pihak yang terlibat, seperti Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan staf di satuan pendidikan. Untuk mendukung hal ini, penting bagi Dinas Pendidikan untuk menyediakan saluran komunikasi yang jelas dan terstruktur, baik melalui pertemuan rutin, pelatihan, maupun platform digital. Selain itu, setiap pihak perlu diberikan informasi yang tepat waktu dan akurat terkait tujuan, strategi, dan tanggung jawab masing-masing dalam program ini. Dengan komunikasi yang baik, keselarasan antara semua elemen dapat tercapai, sehingga program dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Transmisi informasi tergolong kurang baik antara Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Keterbatasan dalam penyampaian informasi menyebabkan ketidakjelasan dalam memahami tahapan dan pembinaan teknis program. Agar program ini dapat berjalan sesuai rencana, diperlukan sistem komunikasi yang lebih lancar dan responsif, sehingga setiap satuan pendidikan memiliki panduan yang tepat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

b. Konsistensi

Konsistensi dalam komunikasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak karena memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang selaras dan menjalankan program sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan komunikasi yang konsisten, informasi yang disampaikan tidak hanya jelas tetapi juga seragam, sehingga menghindari potensi kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda. Untuk mencapainya, Dinas Pendidikan dapat menetapkan pedoman komunikasi resmi, menyelenggarakan pertemuan berkala, dan memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pembaruan secara real-time. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa kepala sekolah,

guru, dan staf lainnya dapat melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif dan mendukung tujuan utama program, yaitu meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Konsistensi dalam komunikasi terkait pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Barito Timur kurang baik diketahui ketidakteraturan dalam penyampaian informasi kepada sekolah-sekolah menyebabkan perbedaan pemahaman tentang kebijakan dan langkah-langkah yang harus diambil. Hal ini berdampak pada kesiapan dan pelaksanaan program yang tidak optimal. Untuk memperbaiki situasi ini, penting untuk memperkuat koordinasi antar pihak terkait dan memastikan bahwa semua informasi disampaikan secara konsisten, seragam, dan tepat waktu kepada setiap sekolah agar program dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Kejelasan

Kejelasan dalam komunikasi merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak karena memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat, mulai dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah, hingga guru dan staf pendidikan, memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, prosedur, dan standar program. Kejelasan ini dapat dicapai melalui penyampaian informasi yang lugas, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta penyediaan dokumen pendukung seperti panduan pelaksanaan atau modul pelatihan. Dengan komunikasi yang jelas, risiko kesalahpahaman atau pelaksanaan yang tidak sesuai standar dapat diminimalkan, sehingga program dapat dijalankan secara efisien dan memberikan dampak positif yang merata di semua satuan pendidikan.

Kejelasan komunikasi yang kurang baik menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Barito Timur. Kurangnya detail dan penjelasan yang cukup mengenai prosedur dan tahapan program menyebabkan kebingungan di tingkat sekolah, yang berakibat pada ketidaksiapan dalam melaksanakan program. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan mendalam serta melakukan koordinasi yang lebih intens antara pihak Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan, agar setiap langkah dapat dijalankan dengan lebih efektif dan tepat.

2. Sumber daya

Kebijakan efektif, maka sumber daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik, meliputi staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik, yakni: staf, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pembahasan berikut ini:

a. Keahlian

Pentingnya sumber daya keahlian dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak tidak dapat dipandang sebelah mata, karena keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan pihak terkait sangat berperan dalam kesuksesan implementasi program.

Kekurangan dalam kompetensi dan keahlian petugas atau pendamping dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur berdampak pada efektivitas pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Pendamping yang tidak memenuhi kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan menghambat implementasi program di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelatihan bagi petugas, agar mereka dapat menjalankan tugas pembinaan

dengan lebih optimal dan memastikan setiap sekolah mendapatkan bimbingan yang sesuai untuk mendukung keberhasilan program ini.

b. Informasi

Aspek sumber informasi dalam implementasi kebijakan, khususnya untuk Program Sekolah Penggerak, memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan program. Sumber informasi yang akurat, relevan, dan terpercaya membantu memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat, seperti Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan staf, memiliki pemahaman yang tepat tentang tujuan, prosedur, serta langkah-langkah implementasi program. Selain itu, sumber informasi yang baik dapat membantu dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan evaluasi program. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Pendidikan untuk menyediakan sumber informasi yang jelas, seperti pedoman resmi, pelatihan, portal digital, dan layanan konsultasi, guna mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di berbagai daerah

Kurangnya sumber daya informasi menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Barito Timur. Meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, distribusi informasi yang kurang efektif menghalangi implementasinya dengan maksimal. Untuk itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem distribusi informasi agar semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga satuan pendidikan, dapat memahami dan melaksanakan program dengan baik.

c. Wewenang

Wewenang dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Barito Timur mencakup tanggung jawab dan hak yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait untuk menjalankan program sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Dinas Pendidikan memiliki wewenang utama dalam merumuskan rencana pelaksanaan, mengalokasikan anggaran, memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik, serta memantau dan mengevaluasi program. Kepala sekolah diberi wewenang untuk mengelola implementasi program di tingkat sekolah, termasuk menyusun strategi pembelajaran, membimbing guru, dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak melalui penerapan wewenang yang efektif. Dengan memberikan bimbingan terstruktur dan dukungan teknis secara konsisten, dinas berperan penting dalam membantu sekolah-sekolah mencapai standar yang diharapkan, serta memastikan program berjalan sesuai tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

d. Fasilitas

Fasilitas memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan Program Sekolah Penggerak, karena menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar serta pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan peserta didik. Fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, akses teknologi informasi, laboratorium yang lengkap, serta perpustakaan yang memadai, membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan inovatif.

Fasilitas penunjang program sekolah penggerak tergolong kurang baik diketahui keterbatasan fasilitas penunjang seperti perangkat teknologi dan koneksi internet yang memadai, menjadi kendala utama dalam implementasi program sekolah penggerak di Kabupaten Barito Timur, terutama di sekolah-sekolah terpencil.

3. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan, termasuk Program Sekolah Penggerak, mencerminkan kecenderungan perilaku dan cara mereka menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Sikap pelaksana yang positif, seperti antusiasme, komitmen, dan keterbukaan terhadap perubahan, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Pelaksana yang berorientasi pada solusi cenderung lebih proaktif dalam mengatasi hambatan, sementara sikap kolaboratif memfasilitasi koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, guru, dan masyarakat

a. Tanggungjawab

Tanggung jawab sangat penting dalam pelaksanaan program sekolah penggerak karena program ini bertujuan untuk mendorong perubahan positif di sekolah, baik dalam pembelajaran, kepemimpinan, maupun budaya sekolah secara keseluruhan. Program sekolah penggerak membutuhkan komitmen dan tanggung jawab dari berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, guru, dinas pendidikan, serta masyarakat.

Tanggung jawab yang baik dari kepala sekolah, guru, dan staf pendidikan di Kabupaten Barito Timur menjadi kunci keberhasilan program sekolah penggerak, meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas. Kolaborasi dan komitmen mereka memastikan program tetap berjalan efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Komitmen

Komitmen merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak karena mencerminkan dedikasi dan kesungguhan dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan program. Komitmen yang kuat dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan staf pendidikan memastikan bahwa setiap langkah pelaksanaan dilakukan dengan konsisten, terencana, dan berorientasi pada hasil.

Komitmen yang baik dari kepala sekolah, guru, dan pihak terkait di Kabupaten Barito Timur menjadi kunci keberhasilan program sekolah penggerak, meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas, mereka tetap berinovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salahsatu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Dua faktor yang memungkinkan terhambat fungsi struktur birokrasi, yakni faktor internal, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar (*Standard Operating Procedures – SOP*) dan faktor eksternal, yakni fragmentasi. Fragmentasi dapat berupa tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi, komite dalam legislative, interest group, pejabat-pejabat eksekutif dan faktor eksternal lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pembahasan berikut ini:

a. *Standar Operating Procedure* (SOP)

Standar Operating Procedure (SOP) sangat penting dalam pelaksanaan program sekolah penggerak karena memberikan pedoman yang jelas dan sistematis bagi setiap pihak yang terlibat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara konsisten.

Adanya *Standar Operating Procedure* (SOP) yang diterapkan di Kabupaten Barito Timur sangat membantu dalam memastikan pelaksanaan program sekolah penggerak berjalan dengan baik. SOP yang terstruktur memberikan panduan yang jelas bagi setiap sekolah, memudahkan koordinasi antar pihak terkait, serta memastikan konsistensi dalam pelaksanaan program. Dengan adanya SOP, program dapat dilaksanakan dengan lebih terorganisir, yang

pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

b. Fragmentasi

Fragmentasi dalam struktur birokrasi merujuk pada pembagian atau pemisahan tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi atau sistem birokrasi yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi, komunikasi yang terhambat, dan pengambilan keputusan yang terpisah-pisah. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan program sekolah penggerak, fragmentasi dapat muncul ketika berbagai bagian dalam birokrasi pendidikan (misalnya, dinas pendidikan kabupaten, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait lainnya) tidak memiliki hubungan yang terintegrasi atau terkoordinasi dengan baik.

Pembagian tugas terdistribusi kurang baik diketahui kendala dalam pelaksanaan program sekolah penggerak di Kabupaten Barito Timur terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, khususnya guru yang terlatih untuk mengimplementasikan kurikulum dan metode pembelajaran baru. Meskipun Dinas Pendidikan telah memberikan pelatihan, kesenjangan kompetensi ini menyebabkan pembagian tugas antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah tidak berjalan efektif, menghambat keberhasilan program.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Sekolah Penggerak oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

1. Faktor Penghambat

a. Kurangnya penyebaran informasi

Masalah koordinasi yang kurang baik antara Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan di Kabupaten Barito Timur mempengaruhi transmisi, konsistensi, dan kejelasan informasi yang diterima oleh sekolah. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan koordinasi yang lebih baik, sistem komunikasi yang lebih terstruktur, dan pembagian tugas yang jelas. Selain itu, kualitas fasilitas dan pendampingan bagi guru juga harus ditingkatkan agar program pendidikan dapat berjalan lebih efektif. Dengan perbaikan di bidang koordinasi, komunikasi, dan fasilitas, pelaksanaan program pendidikan di tingkat sekolah dapat lebih optimal dan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik.

b. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas

Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi, menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Timur. Banyak guru yang tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, baik dalam hal bidang keahlian maupun pemahaman terhadap kurikulum yang berlaku. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya perbaikan melalui peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, pendampingan, dan program sertifikasi yang terstruktur. Selain itu, perlu adanya penambahan jumlah guru, terutama di bidang-bidang studi yang sangat dibutuhkan, agar pendidikan dapat berlangsung lebih efektif dan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik.

c. Keterbatasan Anggaran yang menyebabkan fasilitas kurang memadai

Terbatasnya fasilitas akibat minimnya anggaran daerah menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program Sekolah Penggerak di Kabupaten Barito Timur. Kondisi ini menghambat sekolah-sekolah dalam mencapai target program secara optimal. Diperlukan peningkatan alokasi anggaran dan strategi pendanaan yang lebih efisien untuk memastikan penyediaan fasilitas yang mendukung keberhasilan program di seluruh sekolah.

d. Kurangnya Koordinasi antara Dinas Pendidikan, Sekolah dan Fasilitator

Transmisi informasi yang kurang baik antara Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Keterbatasan dalam penyampaian informasi menyebabkan ketidakjelasan dalam memahami tahapan dan pembinaan teknis program. Agar program ini dapat berjalan sesuai rencana, diperlukan sistem komunikasi yang lebih lancar dan responsif, sehingga setiap satuan pendidikan memiliki panduan yang tepat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

2. Faktor Pendorong

a. Komitmen Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

Komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sangat mempengaruhi keberhasilan program ini. Dukungan berupa kebijakan, alokasi dana, serta fasilitas yang memadai menunjukkan bahwa pemerintah daerah berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, pendampingan dan pelatihan yang diberikan kepada tenaga pendidik menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi program yang efektif di lapangan.

b. Tanggungjawab kerja yang tinggi

Tanggung jawab yang baik dari kepala sekolah, guru, dan staf pendidikan di Kabupaten Barito Timur menjadi kunci keberhasilan program sekolah penggerak, meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas. Kolaborasi dan komitmen mereka memastikan program tetap berjalan efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan.

SIMPULAN

1. Implementasi Program Sekolah Penggerak oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur tergolong kurang baik dilihat dari beberapa aspek yakni: Pertama, komunikasi yang meliputi transmisi atau penyebaran informasi yang dilakukan terkait program Sekolah Penggerak kurang baik antara Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur dan satuan pendidikan mengakibatkan kurangnya pemahaman yang mendalam di tingkat sekolah terkait Program Sekolah Penggerak, konsistensi komunikasi terkait program Sekolah Penggerak kurang baik Informasi yang tidak seragam atau terlambat diterima oleh pihak sekolah menyebabkan kesulitan dalam mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan, kejelasan informasi kurang baik seperti kurangnya detail dan penjelasan yang cukup mengenai prosedur dan tahapan program menyebabkan kebingungan di tingkat sekolah. Kedua, sumber daya meliputi keahlian tergolong kurang baik dilihat dari kekurangan dalam kompetensi dan keahlian petugas atau pendamping, ketersediaan informasi yang kurang baik dilihat dari informasi yang tidak tersampaikan dengan baik dan tepat waktu kepada seluruh pihak terkait menyebabkan kebingungan dan ketidaksiapan dalam melaksanakan tugas yang diharapkan, wewenang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur dapat dijalankan dengan baik, fasilitas tergolong kurang baik seperti perangkat digital, akses internet, dan ruang belajar yang belum sepenuhnya tersedia. Ketiga, sikap pelaksana meliputi tanggungjawab kerja yang baik terlihat dari komitmen kepala sekolah, guru, dan staf pendidikan dalam menjalankan tugas mereka, komitmen yang baik dari semua pihak yang terlibat, terutama kepala sekolah dan guru. Keempat, struktur birokrasi meliputi *Standar Operating Procedure* (SOP) yang baik diketahui setiap sekolah memiliki pedoman yang memastikan proses pembelajaran, pengelolaan administrasi, dan evaluasi berjalan dengan konsisten dan efisien,

fragmentasi yang kurang baik dilihat dari pembagian tugas dinilai kurang baik dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten menjadi kendala utama dalam pembagian tugas antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah dalam pelaksanaan program sekolah penggerak di Kabupaten Barito Timur.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Program Sekolah Penggerak oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur meliputi faktor penghambat yakni kurangnya penyebaran informasi, terutama sosialisasi ke seluruh sekolah penggerak di wilayah terpencil mengalami kesulitan akses akibat kendala geografis dan teknologi. Selain itu, kapasitas SDM terbatas, dengan hanya 6 sekolah yang memiliki fasilitator dan pendamping PSP, sementara ada 13 sekolah penggerak. Keterbatasan anggaran juga menjadi masalah, di mana alokasi dana untuk pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan PSP masih sangat minim, sehingga beberapa kegiatan terpaksa ditunda. Terakhir, koordinasi yang kurang optimal antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan fasilitator PSP turut menghambat penyelesaian isu-isu di lapangan, kemudian faktor pendorong meliputi komitmen Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak melalui berbagai kebijakan, alokasi anggaran, serta dukungan teknis untuk memajukan pendidikan di wilayah tersebut dan tanggungjawab kerja yang tinggi dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2021. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 162 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Penggerak
- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Anggara, Sahya, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta Pustaka Setia.
- Dunn, William. 2015. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia
- Moloeng, Lexy. J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2013. *Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Nur Mawaddah Islamiyah. 2015. *Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar (Studi Kasus di Sekolah Dasar Kota Bima, NTB)*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media
- Restu Rahayu. 2015. *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Samodra Wibawa. 2014, *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia
- Sinambela dkk, Lijan Poltak. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Calpulis
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Afabeta.



Subarsono. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Tim Penyusun Buku. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) STIA Amuntai*.